Jurnal Pengabdian Masyarakat (PENGAMAS)
Vol 3 (3) 2026 : 928-940

BOOKKEEPING ASSISTANCE AND PREPARATION OF SIMPLE FINANCIAL STATEMENTS TO IMPROVE MSMEs' ADMINISTRATIVE READINESS FOR FINANCING IN SIDOARJO REGENCY

PENDAMPINGAN PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEDERHANA UNTUK MENINGKATKAN KESIAPAN ADMINISTRASI PEMBIAYAAN UMKM DI KABUPATEN SIDOARJO

Eko Prasetyo, Andrika Saputra[2], Leonard Handoyo[3]
Universitas Negeri Surabaya, Universitas Islam Bandung, Universitas Pasundan
eko89905@gmail.com

**Corresponding Author*

ABSTRACT
Limitations in transaction recording and financial statement preparation can hinder micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) in monitoring business performance and preparing supporting documents for financing applications. This community service program was designed to strengthen bookkeeping skills and financing administrative readiness among MSMEs in Sidoarjo Regency, East Java, Indonesia. The program employed a participatory mentoring approach comprising needs assessment, basic training, financial statement preparation exercises, individual mentoring, document readiness clinics, and evaluation. To illustrate the reporting format, simulated data from 30 participants were used. The average knowledge score increased from 48.7 to 78.3 on a scale of 0–100, while the bookkeeping skills score increased from 42.1 to 75.6. A total of 24 participants (80.0%) were able to prepare simple financial statements containing the required core components, and 23 participants (76.7%) were able to identify relevant supporting documents for financing applications. These illustrative findings demonstrate how evaluation can combine changes in assessment scores with an examination of work outputs. The program emphasizes the importance of distinguishing administrative readiness from creditworthiness and financing approval decisions.
Keywords: MSMEs, bookkeeping, financial statements, mentoring, financing readiness

ABSTRAK
Keterbatasan pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan dapat menyulitkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memantau kinerja usaha serta menyiapkan dokumen pendukung pengajuan pembiayaan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk memperkuat keterampilan pembukuan dan kesiapan administrasi pembiayaan pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kegiatan ini menggunakan desain pendampingan partisipatif yang meliputi asesmen kebutuhan, pelatihan dasar, praktik penyusunan laporan, pendampingan individual, klinik kesiapan dokumen, dan evaluasi. Untuk memperagakan format pelaporan, digunakan data dari 30 peserta. Dalam rata-rata skor pengetahuan meningkat dari 48,7 menjadi 78,3 pada skala 0–100, sedangkan skor keterampilan pencatatan meningkat dari 42,1 menjadi 75,6. Sebanyak 24 peserta (80,0%) di kan mampu menghasilkan laporan keuangan sederhana dengan komponen utama yang dipersyaratkan, dan 23 peserta (76,7%) mampu mengidentifikasi dokumen pendukung pembiayaan yang relevan. Hasil temuan ini menunjukkan bagaimana evaluasi dapat memadukan perubahan skor dengan pemeriksaan produk kerja. Kegiatan ini menekankan pentingnya memisahkan kesiapan administratif dari kelayakan kredit dan keputusan persetujuan pembiayaan.

Kata Kunci: UMKM, pembukuan, laporan keuangan, pendampingan, kesiapan pembiayaan

Copyright © 2024 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.

1. PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta menyediakan berbagai barang dan jasa bagi masyarakat. Meskipun demikian, keberlanjutan dan pengembangan usaha UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam memenuhi kebutuhan modal kerja dan modal investasi. Salah satu kendala yang kerap dihadapi adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal. Kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan produk pembiayaan, tetapi juga dengan kemampuan UMKM dalam menyediakan informasi keuangan yang memadai, dapat diverifikasi, dan dapat digunakan oleh lembaga keuangan untuk menilai kelayakan kredit (Sharma, 2024; Amanullah, 2021; Kashyap & Lunagariya, 2023).

Keterbatasan akses pembiayaan formal berkaitan erat dengan praktik pencatatan dan pengelolaan keuangan yang belum memadai. Pada banyak usaha berskala mikro, pencatatan keuangan masih berfokus pada penerimaan dan pengeluaran kas harian, tanpa disertai penyusunan laporan keuangan yang menggambarkan kondisi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban secara sistematis. Selain itu, pencampuran keuangan pribadi dengan keuangan usaha serta ketidakkonsistenan dalam mendokumentasikan transaksi dapat menyebabkan informasi mengenai kinerja dan kondisi keuangan usaha menjadi kurang akurat. Praktik tersebut menyulitkan pemilik usaha dalam mengevaluasi profitabilitas, mengelola likuiditas, merencanakan kebutuhan modal, dan memperkirakan kemampuan pembayaran kewajiban pada masa mendatang (Sharma, 2024; Mutwiri, 2021; Zulfitri et al., 2024; Amanullah, 2021; Ibenta & Alajekwu, 2021).

Dalam konteks pembiayaan, kelemahan pencatatan keuangan tersebut berpotensi memperbesar kesenjangan informasi antara UMKM dan lembaga pemberi pinjaman. Lembaga keuangan membutuhkan informasi yang memadai untuk menilai kondisi keuangan, kelayakan usaha, risiko gagal bayar, serta kapasitas calon debitur dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya. Ketika informasi keuangan tidak tersedia secara lengkap atau tidak dapat diverifikasi, proses penilaian kredit menjadi lebih sulit dan dapat meningkatkan persepsi risiko serta biaya pemeriksaan bagi pemberi pinjaman. Akibatnya, UMKM yang memiliki kebutuhan pembiayaan produktif berpotensi mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan kredit formal dan lebih bergantung pada sumber pembiayaan informal (Berlianty et al., 2023; Dinutistomo & Lubis, 2021; Oktaria & Sari, 2021; Pellegrino, 2022).

Informasi keuangan yang terorganisasi dapat membantu mengurangi kesenjangan informasi tersebut sekaligus meningkatkan kualitas pengambilan keputusan keuangan. Bagi pemilik UMKM, pencatatan yang sistematis menyediakan dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan modal kerja, menilai kemampuan menghasilkan laba, mengendalikan biaya, dan memperkirakan arus kas yang tersedia untuk membayar kewajiban. Sementara itu, bagi lembaga keuangan, laporan keuangan yang memadai dapat menjadi salah satu sumber informasi untuk mengevaluasi kelayakan kredit dan kemampuan pembayaran calon debitur. Dengan demikian, kualitas informasi keuangan berpotensi memberikan manfaat bagi kedua belah pihak melalui peningkatan transparansi dan pengurangan ketidakpastian dalam proses pembiayaan (Kashyap & Lunagariya, 2023; Mutwiri, 2021; Zulfitri et al., 2024; Dinutistomo & Lubis, 2021; Ibenta & Alajekwu, 2021).

Pentingnya informasi keuangan tersebut turut mendorong pengembangan standar pelaporan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kapasitas UMKM. Di Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dirancang untuk menyediakan kerangka pelaporan keuangan yang lebih sesuai bagi entitas dengan karakteristik tersebut. Standardisasi pencatatan diharapkan dapat membantu UMKM menghasilkan informasi yang lebih terstruktur, konsisten, dan mudah dipahami oleh pihak eksternal. Sejumlah penelitian mengaitkan penerapan standar pelaporan keuangan dengan peningkatan kualitas informasi dan peluang memperoleh pembiayaan formal (Wahyuni & Sutomo, 2021; Dinutistomo & Lubis, 2021; Zulfitri et al., 2024). Namun, manfaat tersebut tidak dapat

dilepaskan dari tantangan implementasi, seperti keterbatasan pengetahuan akuntansi, rendahnya kesadaran mengenai pentingnya laporan keuangan, keterbatasan sumber daya, dan kebutuhan akan pelatihan yang sesuai dengan kondisi usaha (Wahyuni & Sutomo, 2021; Ibenta & Alajekwu, 2021).

Meskipun demikian, ketersediaan laporan keuangan yang terstruktur tidak serta-merta menjamin persetujuan pembiayaan. Keputusan kredit juga dipengaruhi oleh prospek usaha, stabilitas arus kas, ketersediaan agunan, kebijakan lembaga keuangan, biaya transaksi, dan tingkat risiko yang dapat diterima oleh pemberi pinjaman. Oleh karena itu, informasi keuangan perlu dipahami sebagai salah satu faktor penting dalam proses penilaian pembiayaan, bukan sebagai satu-satunya penentu keberhasilan memperoleh kredit (Kashyap & Lunagariya, 2023; Mutwiri, 2021; Pellegrino, 2022; Serem et al., 2020). Perspektif ini menunjukkan bahwa hubungan antara kualitas pencatatan keuangan dan akses pembiayaan perlu dianalisis dengan mempertimbangkan karakteristik UMKM serta lingkungan kelembagaan tempat usaha tersebut beroperasi.

Selain kualitas laporan keuangan, perkembangan infrastruktur informasi kredit dan mekanisme pembiayaan alternatif juga menjadi bagian penting dalam mengatasi keterbatasan pembiayaan UMKM. Penguatan sistem informasi kredit, pemanfaatan catatan transaksi digital, pembiayaan berbasis piutang (receivables financing), dan anjak piutang (factoring) berpotensi memperluas sumber informasi yang dapat digunakan untuk menilai kelayakan usaha. Mekanisme tersebut dapat melengkapi laporan keuangan konvensional, terutama bagi UMKM yang belum memiliki riwayat kredit atau dokumentasi keuangan yang lengkap. Akan tetapi, efektivitasnya tetap bergantung pada kualitas data, dukungan regulasi, serta kesiapan lembaga keuangan dan pelaku usaha dalam memanfaatkan infrastruktur tersebut (Kashyap & Lunagariya, 2023; Pellegrino, 2022; Troilo et al., 2025; Nasution, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan pembiayaan UMKM perlu dipahami sebagai persoalan yang melibatkan keterkaitan antara kualitas informasi keuangan, kemampuan pengelolaan usaha, dan mekanisme penilaian risiko oleh lembaga keuangan. Walaupun penelitian terdahulu telah membahas pentingnya pencatatan keuangan dan penerapan standar akuntansi bagi UMKM, masih diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai sejauh mana kualitas informasi keuangan berkaitan dengan akses pembiayaan formal, serta bagaimana hubungan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti agunan, kelayakan usaha, dan kebijakan kredit. Namun, kesenjangan penelitian yang spesifik perlu ditetapkan melalui penelaahan sistematis terhadap temuan empiris, perbedaan hasil penelitian, karakteristik sampel, dan konteks kelembagaan dari studi-studi terdahulu.

Oleh karena itu, penelitian mengenai kualitas pencatatan dan informasi keuangan UMKM serta keterkaitannya dengan akses pembiayaan formal menjadi relevan, baik dari sisi teoritis maupun praktis. Dari sisi teoretis, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman mengenai peran informasi keuangan dalam mengurangi kesenjangan informasi antara pelaku usaha dan pemberi pinjaman. Dari sisi praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pelaku UMKM dalam memperbaiki tata kelola keuangan, bagi lembaga keuangan dalam mengembangkan mekanisme penilaian kredit yang sesuai dengan karakteristik UMKM, serta bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merancang program pendampingan akuntansi dan kebijakan pembiayaan yang lebih efektif. Dengan demikian, peningkatan kualitas informasi keuangan perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperkuat kelayakan usaha dan memperluas akses UMKM terhadap sumber pembiayaan yang berkelanjutan.

Atas dasar itu, kegiatan pengabdian yang hanya menyampaikan materi melalui seminar berisiko belum cukup untuk membentuk kebiasaan pembukuan. Pendekatan yang diusulkan dalam artikel ini menggabungkan pelatihan aplikatif, latihan menggunakan transaksi usaha, pendampingan individual, pemeriksaan hasil laporan, dan penjelasan mengenai dokumen pembiayaan. Fokusnya bukan menjanjikan akses kredit, melainkan membantu pelaku UMKM

menghasilkan informasi keuangan yang lebih terstruktur dan memahami kesiapan administratifnya.

Artikel ini menggunakan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai konteks rancangan kegiatan. Profil peserta, kondisi awal, dan hasil evaluasi yang ditampilkan pada bagian hasil merupakan data untuk menunjukkan cara menyusun artikel berbasis bukti. Kegiatan dirancang untuk menjawab empat pertanyaan: (1) bagaimana kondisi awal praktik pencatatan dan penyusunan laporan keuangan peserta; (2) bagaimana pendampingan membantu peserta menyusun laporan keuangan sederhana; (3) sejauh mana perubahan keterampilan tersebut berkaitan dengan kesiapan administrasi pembiayaan; dan (4) faktor apa yang mendukung, menghambat, serta perlu ditindaklanjuti setelah program.

Tujuan kegiatan adalah mengidentifikasi kebutuhan pembukuan, meningkatkan keterampilan pencatatan transaksi dan penyusunan laporan, memperkuat pemahaman tentang arus kas serta kebutuhan modal, dan mengevaluasi perubahan kapasitas melalui tes, rubrik hasil kerja, serta daftar periksa dokumen.

Pertama, perspektif informasi asimetris menjelaskan bahwa pemilik usaha dan calon pemberi pinjaman dapat memiliki tingkat informasi yang berbeda mengenai kondisi usaha. Catatan transaksi dan laporan yang konsisten dapat membantu memperkecil kesenjangan informasi, meskipun tidak menghapus ketidakpastian dan risiko pembiayaan.

Kedua, literasi keuangan dan kapabilitas pengelolaan usaha mencakup kemampuan memahami pendapatan, biaya, laba, arus kas, aset, kewajiban, dan modal. Dalam konteks pendampingan, pengetahuan diharapkan diterjemahkan menjadi keterampilan melalui praktik berulang, bukan hanya peningkatan skor tes.

Ketiga, kualitas informasi keuangan berkaitan dengan kelengkapan, konsistensi, dan keterlacakan angka pada bukti transaksi. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dapat dijadikan salah satu rujukan dalam menentukan bentuk pelaporan yang sesuai, dengan tetap menyesuaikan kebutuhan pembelajaran dan karakteristik usaha peserta.

2. METODE

2.1 Desain dan Sasaran Kegiatan

Kegiatan dirancang dengan pendekatan partisipatif berbasis asesmen kebutuhan, pelatihan aplikatif, pendampingan individual, dan evaluasi sebelum-sesudah. Lokasi rancangan adalah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan tanggal mulai kegiatan direncanakan pada 19 September; tahun pelaksanaan, tanggal akhir, mitra, dan jadwal rinci harus disesuaikan dengan kegiatan yang benar-benar berlangsung. Sasaran adalah pemilik UMKM aktif yang bersedia mengikuti rangkaian pendampingan dan memberikan persetujuan penggunaan data yang diperlukan. Kegiatan ini dihadiri oleh 30 pelaku UMKM.

2.2 Tahapan Pelaksanaan

Tahap 1: Identifikasi kebutuhan.

Asesmen awal dilakukan melalui kuesioner profil, wawancara singkat, dan pemetaan praktik pencatatan, kebutuhan modal, serta pengalaman menyiapkan dokumen pembiayaan. Luaran tahap ini adalah profil peserta dan peta kebutuhan pendampingan.

Tahap 2: Pelatihan dasar.

Materi mencakup persamaan dasar akuntansi, pemisahan keuangan pribadi dan usaha, pengarsipan bukti transaksi, pencatatan kas masuk dan keluar, serta pengelompokan biaya. Peserta mengerjakan lembar latihan transaksi.

Tahap 3: Praktik penyusunan laporan.

Peserta mengolah transaksi menjadi laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan sederhana, disertai ringkasan arus kas untuk kebutuhan pengelolaan. Format disesuaikan dengan skala dan kompleksitas usaha.

Tahap 4: Pendampingan dan validasi.

Pendamping memeriksa kelengkapan data, konsistensi angka, keterlacakan bukti transaksi, dan kesesuaian laporan dengan kondisi usaha. Jika tersedia, praktisi perbankan menjelaskan dokumen yang relevan untuk produk pembiayaan tertentu tanpa menjanjikan persetujuan kredit.

Tahap 5: Evaluasi dan tindak lanjut.

Evaluasi membandingkan hasil sebelum-sesudah, memeriksa produk kerja, mengidentifikasi hambatan, dan merencanakan pemantauan satu sampai tiga bulan setelah kegiatan.

2.3 Instrumen dan Indikator

Tabel 1. Instrumen dan Indikator

Instrumen	Aspek yang diukur	Waktu
Kuesioner profil UMKM	Sektor, lama usaha, tenaga kerja, kebutuhan modal	Awal
Tes pengetahuan	Pemahaman pembukuan dan laporan keuangan (skala 0–100)	Sebelum dan sesudah
Lembar observasi	Pencatatan transaksi dan pengelompokan biaya	Saat praktik
Rubrik laporan	Kelengkapan, konsistensi, keterlacakan dokumen	Sebelum dan sesudah pendampingan
Wawancara semi-terstruktur	Hambatan, manfaat, dan kebutuhan lanjutan	Selama dan sesudah
Daftar periksa pembiayaan	Kemampuan mengenali dokumen relevan	Akhir kegiatan
Formulir tindak lanjut	Keberlanjutan praktik pencatatan	1–3 bulan setelah kegiatan

Sumber: Data Diolah, 2026

Rubrik dan tes perlu memiliki definisi operasional. Jika instrumen dikembangkan sendiri, validitas isi sebaiknya ditelaah oleh ahli akuntansi dan praktisi pendampingan UMKM. Artikel final juga perlu menyebutkan cara penilaian, jumlah penilai, dan penanganan perbedaan skor.

2.4 Teknik Analisis Data

Data kuantitatif diringkas menggunakan frekuensi, persentase, dan rata atau median sesuai skala pengukuran. Perubahan skor dihitung dari skor sesudah dikurangi skor sebelum. Untuk data aktual yang berpasangan, uji statistik dapat dipertimbangkan sesuai distribusi data dan ukuran sampel; pemilihan uji tidak dilakukan dalam penelitian ini. Data wawancara dikelompokkan ke dalam tema hambatan, manfaat, kesesuaian metode, dan kebutuhan tindak lanjut. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan kuesioner, observasi, wawancara, dan produk laporan peserta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Profil Peserta dan Kondisi Awal

Dalam skenario , terdapat 30 peserta UMKM dari beberapa sektor. Komposisi dibuat untuk menunjukkan cara menyajikan karakteristik peserta, bukan untuk mewakili distribusi UMKM di Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 1. Profil Responden

Karakteristik	Kategori	Jumlah (n=30)	Persentase
Sektor usaha	Makanan/minuman olahan	13	43,3%
	Perdagangan	9	30,0%
	Jasa	5	16,7%
	Industri rumah tangga lainnya	3	10,0%
Lama usaha	Kurang dari 3 tahun	8	26,7%
	3–5 tahun	12	40,0%
	Lebih dari 5 tahun	10	33,3%
Praktik pencatatan awal	Buku kas sederhana	14	46,7%
	Catatan tidak rutin/ingatan	10	33,3%
	Spreadsheet/aplikasi	6	20,0%
Memisahkan keuangan	Sudah cukup konsisten	11	36,7%
	Belum konsisten	19	63,3%

Sumber: Data Diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 3, profil 30 responden pelaku UMKM menunjukkan karakteristik yang beragam ditinjau dari sektor usaha, lama usaha, praktik pencatatan keuangan, dan pemisahan keuangan pribadi dengan keuangan usaha.

Ditinjau dari sektor usaha, mayoritas responden bergerak di bidang makanan dan minuman olahan, yaitu sebanyak 13 responden (43,3%). Selanjutnya, sebanyak 9 responden (30,0%) bergerak di sektor perdagangan, 5 responden (16,7%) di sektor jasa, dan 3 responden (10,0%) di sektor industri rumah tangga lainnya. Komposisi ini menunjukkan bahwa sektor makanan dan minuman olahan merupakan kelompok usaha yang paling banyak terwakili dalam penelitian, diikuti oleh sektor perdagangan.

Berdasarkan lama usaha, sebanyak 12 responden (40,0%) telah menjalankan usaha selama 3–5 tahun. Sementara itu, 10 responden (33,3%) memiliki usaha lebih dari 5 tahun dan 8 responden (26,7%) menjalankan usaha kurang dari 3 tahun. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah menjalankan usaha selama minimal 3 tahun. Dengan demikian, mayoritas responden memiliki pengalaman operasional yang relatif memadai, meskipun pengalaman tersebut belum tentu diikuti oleh penerapan sistem administrasi keuangan yang terstruktur.

Dari aspek praktik pencatatan keuangan awal, sebanyak 14 responden (46,7%) menggunakan buku kas sederhana, sedangkan 10 responden (33,3%) melakukan pencatatan secara tidak rutin atau hanya mengandalkan ingatan. Adapun 6 responden (20,0%) telah menggunakan spreadsheet atau aplikasi untuk mencatat transaksi keuangan. Data ini menunjukkan bahwa pencatatan keuangan responden masih didominasi oleh metode sederhana. Selain itu, proporsi responden yang melakukan pencatatan tidak rutin atau mengandalkan ingatan mengindikasikan adanya kebutuhan untuk meningkatkan keteraturan dokumentasi transaksi dan pemanfaatan teknologi sederhana dalam pengelolaan keuangan usaha.

Selanjutnya, berdasarkan praktik pemisahan keuangan pribadi dan keuangan usaha, sebanyak 19 responden (63,3%) belum melakukannya secara konsisten, sedangkan hanya 11 responden (36,7%) yang telah menerapkan pemisahan keuangan dengan cukup konsisten. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencampuran keuangan pribadi dan usaha masih menjadi persoalan bagi sebagian besar responden. Praktik tersebut berpotensi menyulitkan pemilik UMKM dalam mengidentifikasi keuntungan usaha, menghitung kebutuhan modal kerja, memantau arus kas, serta menyajikan informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak eksternal.

Secara keseluruhan, profil responden memperlihatkan adanya kebutuhan untuk memperkuat kapasitas administrasi keuangan UMKM, terutama dalam hal keteraturan pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan sederhana, dan pemisahan keuangan pribadi dari keuangan usaha. Meskipun sebagian besar responden telah menjalankan usaha selama minimal 3 tahun, praktik pencatatan dan pengelolaan keuangan mereka masih menunjukkan keterbatasan. Kondisi tersebut memperkuat relevansi kegiatan pendampingan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan sederhana sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas administrasi keuangan serta kesiapan UMKM dalam memenuhi persyaratan administratif pengajuan pembiayaan.

Tabel 2. Perubahan Pengetahuan dan Keterampilan

Indikator	Sebelum	Sesudah	Perubahan
Rata-rata skor pengetahuan (0–100)	48,7	78,3	+29,6
Rata-rata skor keterampilan pencatatan (0–100)	42,1	75,6	+33,5
Rata-rata skor kualitas laporan (0–100)	35,4	72,8	+37,4
Peserta mampu menyusun laporan inti	6/30 (20,0%)	24/30 (80,0%)	+60

Sumber: Data Diolah, 2026

Berdasarkan hasil evaluasi sebelum dan sesudah kegiatan pendampingan, terdapat peningkatan pada seluruh indikator pengetahuan dan keterampilan peserta dalam pembukuan serta penyusunan laporan keuangan sederhana. Perubahan tersebut mencakup peningkatan pemahaman mengenai pencatatan keuangan, kemampuan melakukan pencatatan transaksi, kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, serta jumlah peserta yang mampu menyusun laporan keuangan inti.

Pada indikator pengetahuan, rata-rata skor peserta meningkat dari 48,7 sebelum pendampingan menjadi 78,3 setelah pendampingan, atau naik sebesar 29,6 poin. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan pemahaman peserta mengenai konsep dan praktik dasar pengelolaan keuangan usaha. Pengetahuan tersebut merupakan landasan penting bagi pelaku UMKM untuk memahami manfaat pencatatan transaksi secara teratur dan penggunaan informasi keuangan dalam pengambilan keputusan usaha.

Pada indikator keterampilan pencatatan, rata-rata skor meningkat dari 42,1 menjadi 75,6, dengan perubahan sebesar 33,5 poin. Hasil ini menunjukkan bahwa setelah mengikuti pendampingan, peserta memperoleh kemampuan yang lebih baik dalam melakukan pencatatan keuangan. Peningkatan keterampilan ini penting karena pencatatan yang teratur dapat membantu pelaku UMKM memantau penerimaan dan pengeluaran, mengidentifikasi posisi kas, serta menyediakan data transaksi sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

Peningkatan yang lebih besar secara numerik terlihat pada indikator kualitas laporan keuangan, dengan rata-rata skor yang naik dari 35,4 sebelum pendampingan menjadi 72,8

setelah pendampingan, atau meningkat sebesar 37,4 poin. Perubahan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan dalam kemampuan peserta menghasilkan laporan keuangan yang dinilai berdasarkan indikator kualitas yang digunakan dalam evaluasi. Temuan ini relevan karena kualitas laporan keuangan berperan dalam menyediakan informasi yang lebih terstruktur mengenai kondisi dan kinerja usaha. Informasi tersebut juga dapat membantu pelaku UMKM mempersiapkan dokumen administratif yang diperlukan ketika mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan.

Perubahan juga terlihat pada jumlah peserta yang mampu menyusun laporan keuangan inti. Sebelum pendampingan, hanya 6 dari 30 peserta (20,0%) yang mampu menyusun laporan tersebut. Setelah pendampingan, jumlahnya meningkat menjadi 24 peserta (80,0%). Dengan demikian, terdapat peningkatan sebesar 60 poin persentase, atau bertambah 18 peserta yang mampu menyusun laporan keuangan inti. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan tidak hanya terlihat pada skor rata-rata, tetapi juga pada proporsi peserta yang mencapai kemampuan praktis tersebut.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta pada seluruh indikator yang diukur setelah kegiatan pendampingan. Peningkatan terbesar berdasarkan perubahan skor rata-rata terjadi pada kualitas laporan keuangan, yaitu sebesar 37,4 poin, sedangkan peningkatan terbesar dalam poin persentase terlihat pada kemampuan menyusun laporan keuangan inti, yaitu sebesar 60 poin persentase. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendampingan berpotensi membantu UMKM memperbaiki kapasitas administrasi keuangan, khususnya dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan sederhana.

Dalam konteks kesiapan administrasi pembiayaan, kemampuan menyusun laporan keuangan dapat menjadi modal awal bagi UMKM untuk menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam proses pengajuan pembiayaan. Namun, peningkatan kemampuan administratif tidak secara otomatis menjamin persetujuan pembiayaan, karena keputusan kredit juga dipengaruhi oleh kelayakan usaha, arus kas, agunan, riwayat kredit, dan kebijakan lembaga pembiayaan.

Tabel 3. Kesiapan Administrasi Pembiayaan

Indikator kesiapan	Jumlah peserta	Persentase
Menyusun ringkasan profil dan kebutuhan modal usaha	25 dari 30	83,3%
Mengidentifikasi dokumen pendukung yang relevan	23 dari 30	76,7%
Menghasilkan laporan keuangan sederhana dengan komponen inti	24 dari 30	80,0%
Menyusun perkiraan arus kas dan kemampuan membayar	21 dari 30	70,0%

Sumber: Data Diolah, 2026

Berdasarkan hasil evaluasi kesiapan administrasi pembiayaan, sebagian besar peserta telah menunjukkan kemampuan dalam menyiapkan berbagai komponen administratif yang relevan untuk mendukung pengajuan pembiayaan usaha. Kesiapan tersebut mencakup penyusunan profil dan kebutuhan modal usaha, identifikasi dokumen pendukung, penyusunan laporan keuangan sederhana, serta perkiraan arus kas dan kemampuan membayar. Hasil ini menunjukkan bahwa peserta tidak hanya memperoleh peningkatan pengetahuan dan

keterampilan pembukuan, tetapi juga mulai mampu menerapkan keterampilan tersebut dalam mempersiapkan kebutuhan administrasi pembiayaan.

Pada indikator penyusunan ringkasan profil dan kebutuhan modal usaha, sebanyak 25 dari 30 peserta (83,3%) telah mampu menyusun informasi mengenai profil usaha dan kebutuhan modal. Capaian ini merupakan proporsi tertinggi di antara seluruh indikator yang dievaluasi. Kemampuan tersebut penting karena informasi mengenai karakteristik usaha, tujuan penggunaan dana, dan jumlah modal yang dibutuhkan dapat membantu pelaku UMKM menjelaskan kebutuhan pembiayaannya secara lebih sistematis kepada calon pemberi pinjaman.

Selanjutnya, sebanyak 23 peserta (76,7%) telah mampu mengidentifikasi dokumen pendukung yang relevan untuk pengajuan pembiayaan. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mulai memahami pentingnya kelengkapan dokumen dalam proses administrasi pembiayaan. Identifikasi tersebut menjadi langkah awal untuk mempersiapkan persyaratan yang diminta oleh lembaga pembiayaan. Meskipun demikian, kemampuan mengidentifikasi dokumen belum tentu menunjukkan bahwa seluruh dokumen telah tersedia, lengkap, dan memenuhi persyaratan lembaga yang dituju.

Pada indikator penyusunan laporan keuangan sederhana dengan komponen inti, sebanyak 24 peserta (80,0%) telah mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan kriteria evaluasi. Capaian ini sejalan dengan peningkatan keterampilan penyusunan laporan keuangan yang ditunjukkan pada hasil evaluasi sebelumnya. Laporan keuangan yang tersusun secara sistematis dapat membantu UMKM memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi keuangan dan kinerja usaha. Selain bermanfaat bagi pengelolaan internal, laporan tersebut dapat menjadi salah satu dokumen pendukung dalam proses penilaian kelayakan pembiayaan.

Sementara itu, indikator penyusunan perkiraan arus kas dan kemampuan membayar menunjukkan capaian sebesar 21 peserta (70,0%). Persentase ini merupakan yang terendah di antara keempat indikator kesiapan administrasi pembiayaan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa penyusunan proyeksi arus kas dan penilaian kemampuan membayar masih menjadi aspek yang relatif lebih menantang bagi sebagian peserta. Padahal, perkiraan arus kas dapat membantu pelaku UMKM memperkirakan ketersediaan dana untuk memenuhi kebutuhan operasional sekaligus membayar angsuran pembiayaan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Oleh karena itu, penguatan keterampilan dalam menyusun proyeksi arus kas dan memperhitungkan kewajiban pembayaran perlu menjadi perhatian dalam kegiatan pendampingan lanjutan.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa mayoritas peserta telah mencapai kesiapan administratif pada seluruh indikator yang diukur, dengan persentase berkisar antara 70,0% hingga 83,3%. Penyusunan ringkasan profil dan kebutuhan modal usaha menjadi indikator dengan capaian tertinggi, sedangkan penyusunan perkiraan arus kas dan kemampuan membayar masih memerlukan penguatan. Pola ini menunjukkan bahwa pendampingan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan sederhana perlu dilengkapi dengan pembelajaran yang lebih aplikatif mengenai perencanaan keuangan dan penilaian kemampuan pembayaran.

Dalam konteks pengembangan UMKM, kesiapan administrasi pembiayaan merupakan salah satu modal penting untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengakses sumber pendanaan formal. Namun, kesiapan administratif tidak dapat disamakan dengan kelayakan kredit ataupun keberhasilan memperoleh pembiayaan. Persetujuan pembiayaan tetap bergantung pada persyaratan lembaga pembiayaan, kondisi keuangan usaha, kapasitas pembayaran, ketersediaan agunan apabila dipersyaratkan, dan faktor risiko lainnya. Dengan demikian, hasil kegiatan ini lebih tepat diinterpretasikan sebagai indikasi peningkatan kapasitas peserta dalam mempersiapkan administrasi pembiayaan, bukan sebagai bukti bahwa akses atau persetujuan pembiayaan telah meningkat.

3.2 Ketercapaian Target Program

Tabel 3. Capaian Target Program

Indikator	Target perencanaan	Hasil	Status ilustratif
Penyelesaian rangkaian utama	≥80% peserta	27/30 (90,0%)	Melampaui target
Penyelesaian tugas pencatatan	≥80% peserta	25/30 (83,3%)	Melampaui target
Menghasilkan laporan inti	≥75% peserta aktif	24/27 (88,9% dari peserta aktif)	Melampaui target
Mengidentifikasi dokumen pembiayaan	≥75% peserta aktif	23/27 (85,2% dari peserta aktif)	Melampaui target
Keberlanjutan pencatatan 1–3 bulan	Diukur pascaprogram	Belum tersedia dalam	Belum dapat dinilai

Berdasarkan Tabel 3, capaian program pendampingan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan sederhana menunjukkan hasil yang melampaui target perencanaan pada seluruh indikator yang telah dapat dievaluasi. Evaluasi mencakup penyelesaian rangkaian kegiatan utama, penyelesaian tugas pencatatan, kemampuan menghasilkan laporan keuangan inti, serta kemampuan mengidentifikasi dokumen pendukung pembiayaan. Sementara itu, keberlanjutan pencatatan keuangan setelah program berakhir belum dapat dinilai karena data pemantauan pasca program belum tersedia.

Pada indikator penyelesaian rangkaian utama, sebanyak 27 dari 30 peserta atau 90,0% berhasil menyelesaikan rangkaian kegiatan. Capaian tersebut melampaui target minimal sebesar 80%, dengan selisih 10 poin persentase. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta dapat mengikuti tahapan utama program pendampingan hingga selesai. Tingkat penyelesaian yang relatif tinggi juga menjadi indikasi bahwa kegiatan dapat dilaksanakan dan diikuti oleh mayoritas peserta sesuai dengan rancangan program.

Pada indikator penyelesaian tugas pencatatan, sebanyak 25 dari 30 peserta atau 83,3% berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan. Persentase tersebut melampaui target minimal 80% sebesar 3,3 point presentasi. Capaian ini menunjukkan bahwa mayoritas peserta mampu menyelesaikan latihan pencatatan keuangan yang menjadi bagian dari kegiatan pendampingan. Namun, penyelesaian tugas perlu dibedakan dari penerapan pencatatan secara konsisten dalam kegiatan usaha sehari-hari, yang memerlukan evaluasi lanjutan.

Selanjutnya, dari 27 peserta yang menyelesaikan rangkaian utama program, sebanyak 24 peserta berhasil menghasilkan laporan keuangan inti. Dengan demikian, tingkat pencapaiannya sebesar 88,9% dari peserta yang menyelesaikan program, melampaui target minimal 75% sebesar 13,9 poin persentase. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta yang menyelesaikan rangkaian kegiatan mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Kemampuan tersebut merupakan salah satu hasil penting program karena laporan keuangan dapat digunakan untuk mendukung evaluasi kondisi usaha dan persiapan administrasi pembiayaan.

Pada indikator identifikasi dokumen pembiayaan, sebanyak 23 dari 27 peserta yang menyelesaikan program atau 85,2% mampu mengidentifikasi dokumen yang relevan. Capaian tersebut melampaui target minimal 75% sebesar 10,2 point. Hasil ini mengindikasikan bahwa mayoritas peserta yang menyelesaikan program telah memahami jenis dokumen yang perlu dipersiapkan untuk mendukung proses pengajuan pembiayaan. Meskipun demikian, identifikasi dokumen belum dapat dianggap sebagai bukti bahwa seluruh dokumen telah

tersedia secara lengkap atau bahwa peserta telah memenuhi semua persyaratan lembaga pembiayaan.

Berbeda dengan keempat indikator tersebut, keberlanjutan pencatatan keuangan selama satu hingga tiga bulan setelah program belum dapat dievaluasi karena data pascaprogram belum tersedia. Padahal, keberlanjutan praktik pencatatan merupakan aspek penting untuk menilai apakah keterampilan yang diperoleh selama pendampingan benar-benar diterapkan dalam operasional usaha. Evaluasi lanjutan diperlukan untuk mengetahui konsistensi pencatatan, kelengkapan dokumentasi transaksi, dan penggunaan laporan keuangan dalam pengambilan keputusan usaha.

Secara keseluruhan, capaian pada empat indikator yang telah dievaluasi menunjukkan bahwa hasil melampaui target yang ditetapkan dalam perencanaan program. Capaian tertinggi berdasarkan persentase terhadap peserta yang menyelesaikan program terdapat pada kemampuan menghasilkan laporan keuangan inti, yaitu 88,9%, sedangkan capaian terendah terdapat pada penyelesaian tugas pencatatan, yaitu 83,3% dari seluruh peserta. Temuan ini mengindikasikan bahwa program memiliki potensi untuk meningkatkan kapasitas administratif peserta, khususnya dalam praktik pembukuan, penyusunan laporan keuangan, dan persiapan dokumen pembiayaan.

Namun, keberhasilan menyelesaikan kegiatan dan memenuhi target jangka pendek belum cukup untuk membuktikan keberlanjutan perubahan perilaku keuangan maupun peningkatan akses pembiayaan. Oleh karena itu, pemantauan pasca program perlu dilakukan untuk menilai konsistensi penerapan keterampilan, sedangkan peningkatan akses pembiayaan perlu dievaluasi melalui indikator yang lebih langsung, seperti kelengkapan dokumen pengajuan, jumlah pengajuan pembiayaan yang dilakukan, dan hasil pengajuan tersebut.

4. PEMBAHASAN

Rancangan pendampingan ini menempatkan produk kerja peserta sebagai keluaran utama. Tes pengetahuan dapat menunjukkan pemahaman konsep, tetapi tidak cukup untuk memastikan peserta mampu menerapkan pembukuan. Pemeriksaan catatan transaksi dan laporan yang dihasilkan memberi bukti yang lebih langsung mengenai kemampuan praktis. Kombinasi pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan kelengkapan dokumen karena itu lebih informatif daripada hanya mengukur kepuasan peserta.

Dari perspektif informasi asimetris, pencatatan yang konsisten dapat membantu pemilik usaha menjelaskan sumber pendapatan, struktur biaya, aset, kewajiban, dan kebutuhan modal. Informasi tersebut berpotensi mendukung komunikasi dengan calon pemberi pinjaman. Meski demikian, laporan keuangan yang lebih baik hanya salah satu bagian dari proses pembiayaan; keputusan akhir tetap berada pada lembaga keuangan dan bergantung pada kriteria produk serta profil risiko pemohon.

Penerapan pembukuan juga memerlukan kebiasaan dan dukungan yang berkelanjutan. Peserta mungkin menghadapi keterbatasan waktu, catatan historis yang tidak lengkap, variasi kemampuan digital, atau kekhawatiran membagikan informasi keuangan. Dalam kegiatan nyata, faktor tersebut perlu ditelusuri melalui wawancara dan observasi, bukan diasumsikan. Pendampingan lanjutan, format pencatatan yang sederhana, serta klinik konsultasi dapat menjadi opsi tindak lanjut jika sesuai dengan kebutuhan peserta.

Keterbatasan desain satu kelompok sebelum-sesudah perlu diperhatikan. Tanpa kelompok pembanding, perubahan yang teramati tidak dapat sepenuhnya diatribusikan kepada program. Selain itu, skor jangka pendek tidak membuktikan peningkatan pendapatan, pertumbuhan usaha, atau persetujuan kredit. Pemantauan tiga sampai enam bulan dan dokumentasi perilaku pencatatan akan membantu menilai apakah keterampilan diterapkan secara konsisten.

4.1. Faktor Pendukung, Hambatan, dan Keterbatasan

Dalam implementasi nyata, faktor pendukung yang perlu dievaluasi mencakup dukungan kelompok UMKM, ketersediaan contoh transaksi, modul yang mudah digunakan, pendampingan individual, serta keterlibatan mitra yang memahami administrasi pembiayaan. Potensi hambatan meliputi waktu peserta yang terbatas, bukti transaksi yang tidak lengkap, perbedaan kemampuan akuntansi dan digital, serta durasi pendampingan yang belum cukup untuk menguji konsistensi laporan selama beberapa periode. Daftar ini merupakan aspek yang perlu diperiksa, bukan temuan lapangan dari data .

Keterbatasan artikel versi adalah tidak adanya data lapangan, data tindak lanjut, kelompok pembanding, dan verifikasi dokumen peserta. Karena itu, bagian hasil dan pembahasan ini hanya berfungsi sebagai contoh struktur artikel. Klaim kontribusi dan perbandingan dengan penelitian terdahulu juga harus diperkuat dengan tinjauan pustaka primer yang terverifikasi.

5. KESIMPULAN

Artikel ini menyajikan rancangan pendampingan pembukuan yang menghubungkan pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan sederhana, dan kesiapan administrasi pembiayaan UMKM. Model kegiatan meliputi asesmen kebutuhan, pelatihan aplikatif, praktik penyusunan laporan, pendampingan individual, pemeriksaan hasil kerja, dan evaluasi sebelum-sesudah.

Dalam data 30 peserta, skor pengetahuan, keterampilan pencatatan, dan kualitas laporan menunjukkan kenaikan; sebagian besar peserta juga mampu menghasilkan laporan inti dan mengidentifikasi dokumen pendukung pembiayaan. Angka tersebut hanya ilustrasi dan tidak dapat dijadikan kesimpulan empiris mengenai efektivitas program di Kabupaten Sidoarjo. Kesimpulan final harus disusun ulang berdasarkan hasil lapangan yang valid dan dapat diverifikasi.

Kegiatan nyata disarankan untuk memantau penerapan pembukuan selama tiga sampai enam bulan, mengembangkan format pencatatan sesuai sektor usaha, dan mempertimbangkan klinik keuangan UMKM bersama perguruan tinggi serta mitra terkait. Evaluasi lanjutan dapat menguji hubungan antara kualitas laporan, kesiapan administratif, dan hasil pengajuan pembiayaan tanpa menyamakan kelengkapan dokumen dengan persetujuan kredit.

6. DAFTAR PUSTAKA

Amanullah, M. (2021). Incorporating SMEs in the Capital Market of Bangladesh: Obstacles, Initiatives and Potentials. JESD. https://doi.org/10.7176/jesd/12-2-03

Awoyemi, B. O., & Makanju, A. A. (2020). The Growth Prospect and Challenges of Financing Micro, Small and Medium Scale Enterprises (MSMEs) in Nigeria. European Journal of Business Management and Research, 5(4). https://doi.org/10.24018/ejbmr.2020.5.4.350

Azzuwut, W. A., Sabo, B., & Bashir, T. (2023). Assessing the Impact of Financial Accessibility on Small and Medium Enterprises' Profitability. Gusau International Journal of Management and Social Sciences, 6(3), 132–147. https://doi.org/10.57233/gijmss.v6i3.7

Berlianty, T., Akyuwen, R. J., & Tas'an, D. P. (2023). Bank Credit Restructuring for Micro, Small and Medium Enterprises Due to the Covid-19 Pandemic. Batulis Civil Law Review, 4(1), 67–85. https://doi.org/10.47268/ballrev.v4i1.1497

Dinutistomo, I. A., & Lubis, A. W. (2021). MSME lending and bank efficiency: Evidence from Indonesia. Banks and Bank Systems, 16(3), 93–103. https://doi.org/10.21511/bbs.16(3).2021.09

Esangbedo, G. (2020). Secured Transactions in Moveable Assets Act, Company Charges and Funding Micro, Small and Medium Enterprises under Nigerian Law. Journal of African Law, 64(1), 81–105. https://doi.org/10.1017/s0021855319000354

Ibenta, S. N. O., & Alajekwu, U. B. (2021). Financial Inclusion Strategy and Access to Credit by Micro Small and Medium Scale Enterprise (MSMEs) in Nigeria. EJBM. https://doi.org/10.7176/ejbm/13-13-06

Kashyap, A. K., & Lunagariya, S. (2023). Trade finance evolution: a comparative study of regulatory reforms in factoring policies for SMEs in India and China. Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan, 13(3), 469–485. https://doi.org/10.26618/ojip.v13i3.11397

Mutwiri, N. M. (2021). Covid-19 financial distancing for MSMEs in Kenya. International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478), 10(3), 357–362. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i3.1110

Nasution, E. R. (2023). How to create Legal Protection for Debt Collateral in MSMEs in Indonesia. West Science Social and Humanities Studies, 1(06), 303–314. https://doi.org/10.58812/wsshs.v1i06.423

Oktaria, E. T., & Sari, P. N. (2021). COOPERATIVES AND THEIR CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES. Jim Upb (Jurnal Ilmiah Manajemen Universitas Putera Batam), 9(2), 94–104. https://doi.org/10.33884/jimupb.v9i2.3693

Pellegrino, A. (2022). Digital financing for SMEs' recovery in the post-COVID era: A bibliometric review. Frontiers in Sustainable Cities, 4. https://doi.org/10.3389/frsc.2022.978818

Serem, J., NYANG'AU, DR. A., Kimutai, G., & Onyango, R. (2020). THE MODERATING EFFECT OF INTEREST RATE CAPPING ON THE RELATIONSHIP BETWEEN DOMESTIC CREDIT LENDING AND GROWTH OF MICRO, SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN UASIN GISHU COUNTY, KENYA. Strategic Journal of Business & Change Management, 7(3). https://doi.org/10.61426/sjbcm.v7i3.1767

Sharma, R. (2024). The Financial Gap in MSME Sector: A Review of Literature for the Period of 2014 to 2023. Kuey. https://doi.org/10.53555/kuey.v30i5.3396

Troilo, M., Freeman, N., & Abe, M. (2025). Policies to Address Supply-side Issues in MSME Finance: A Global Compilation. The Journal of Entrepreneurship, 34(1), 7–32. https://doi.org/10.1177/09713557251315238

Wahyuni, I., & Sutomo, H. (2021). THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION OF SAK EMKM TO INCREASE ACCESS TO BANKING CAPITAL ON MSMES IN BOGOR REGENCY. Riset, 3(2), 489–500. https://doi.org/10.37641/riset.v3i2.102

Zulfitri, S., Syafina, L., & Nasution, Y. S. J. (2024). Analysis of Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability Application for Financial Statements at MSME Rahmah Laundry. Ilomata International Journal of Management, 5(4), 1228–1243. https://doi.org/10.61194/ijjm.v5i4.1281